



Dinamika Sosial Dalam Komunikasi Politik: Analisis Pragmatik Terhadap Strategi Bahasa di Indonesia

Syahrir Ibnu^{1*}, Ghozul Azzam Abdurrahman², Athirah Rizki Salsabila³

¹Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

³Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

*Correspondence: syahrir.ibnu@unkhair.ac.id

Article History

Published
26/12/2024

Copyright © 2024
The Author(s): This
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike 4.0
International
(CC BY-SA 4.0)



Abstrak

Artikel ini mengkaji penggunaan strategi bahasa dalam komunikasi politik di Indonesia melalui perspektif pragmatik, dengan fokus pada tindak tutur, implikatur, framing, dan peran media sosial dalam membentuk opini publik. Dalam konteks komunikasi politik yang semakin kompleks, politisi memanfaatkan bahasa tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan calon pemimpin. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak tutur digunakan untuk membangun hubungan emosional dengan audiens, sementara implikatur memungkinkan politisi untuk menyampaikan pesan secara tersirat dan memengaruhi opini tanpa menyebutkan pihak tertentu secara eksplisit. Framing, sebagai alat untuk membentuk persepsi, terbukti efektif dalam menciptakan narasi yang mendukung kebijakan atau kandidat tertentu. Media sosial memperkuat pesan politik dengan mempercepat penyebaran informasi, meskipun juga memperburuk polarisasi politik dan memperbesar risiko disinformasi.

Kata Kunci: Framing, Implikatur, Komunikasi Politik, Media Sosial, Strategi Bahasa

Abstract

This article examines the use of language strategies in political communication in Indonesia through a pragmatic perspective, focusing on speech acts, implicatures, framing, and the role of social media in shaping public opinion. In the context of increasingly complex political communication, politicians use language not only to convey information, but also to influence public perceptions of policies and prospective leaders. The results of the analysis show that speech acts are used to build emotional connections with the audience, while implicatures allow politicians to convey messages implicitly and influence opinions without explicitly mentioning certain parties. Framing, as a tool for shaping perceptions, has proven

effective in creating narratives that support certain policies or candidates. Social media amplifies political messages by accelerating the spread of information, although it also exacerbates political polarization and increases the risk of disinformation.

Keywords: Framing, Implicatures, Political Communication, Social Media, Language Strategies

1. PENDAHULUAN

Bahasa memainkan peran sentral dalam komunikasi politik sebagai instrumen kekuasaan yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk opini public (Dan, 1989; Cangara, 2011). Di Indonesia, keberagaman budaya, agama, dan ideologi memberikan konteks unik dalam dinamika komunikasi politik. Para aktor politik memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk membangun narasi dan memengaruhi tindakan kolektif masyarakat. Sebagaimana dicatat oleh Nurhayati (2023) dan Hamka (2021), strategi penggunaan bahasa sering kali mengandung makna tersembunyi yang dapat memengaruhi pola pikir masyarakat secara signifikan. Peran media sosial dalam komunikasi politik semakin dominan. Platform ini memfasilitasi penyebaran pesan secara cepat dan luas, yang dapat memperkuat narasi politik tertentu atau bahkan memengaruhi persepsi masyarakat secara besar-besaran (Adnan & Mona, 2024); Traubhaar et al (2012). Dalam konteks ini, analisis pragmatik menjadi relevan untuk mengungkap bagaimana strategi bahasa digunakan untuk memanipulasi makna demi tujuan politik tertentu. Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam tentang hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan dinamika sosial dalam komunikasi politik Indonesia. Kajian ini tidak hanya menyoroti strategi pragmatik seperti tindak tutur, implikatur, dan framing tetapi juga memberikan wawasan tentang dampaknya terhadap masyarakat di era digital.

Kompleksitas komunikasi politik di Indonesia menghadirkan tantangan dalam memahami bagaimana bahasa digunakan oleh aktor politik untuk mencapai tujuan strategis mereka. Strategi bahasa, seperti tindak tutur, implikatur, dan framing, menjadi alat penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penggunaan strategi bahasa dalam komunikasi politik di Indonesia melalui pendekatan pragmatik. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana tindak tutur, implikatur, dan framing digunakan oleh aktor politik untuk membangun narasi yang strategis dan persuasif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi pesan-pesan politik, serta berkontribusi pada pengembangan kajian linguistik politik, terutama yang terkait dengan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan dinamika sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) oleh Huyler and McGill (2019) yang mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai strategi bahasa dalam komunikasi politik di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik, baik dari sisi narasi politik yang digunakan oleh aktor politik maupun persepsi publik terhadap narasi tersebut.

2.1 Metode Kualitatif

Metode kualitatif melibatkan wawancara mendalam dengan aktor politik, analisis komunikasi, dan masyarakat sipil untuk memahami pandangan dan pengalaman mereka terkait penggunaan bahasa dalam konteks politik. Selain itu, analisis konten dilakukan terhadap pidato politik, debat, dan kampanye media sosial yang mewakili strategi bahasa tertentu. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penggunaan tindak tutur, implikatur, dan framing dalam komunikasi politik.

2.2 Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif dilakukan melalui survei yang melibatkan 500 responden dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan. Survei dirancang untuk mengukur persepsi publik terhadap pesan-pesan politik dan sejauh mana strategi bahasa memengaruhi opini mereka. Pengumpulan data survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert untuk memastikan hasil yang terukur dan dapat dianalisis secara statistik.

2.3 Prosedur Analisis Data

Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan analisis konten. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan pola persepsi publik serta analisis inferensial untuk menguji hubungan antara strategi bahasa dan pengaruhnya terhadap opini publik.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai dinamika komunikasi politik di Indonesia serta kontribusinya terhadap pembentukan opini publik. Dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini dapat menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan dinamika sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data menunjukkan bahwa bahasa dalam komunikasi politik di Indonesia memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai alat penyampaian informasi tetapi juga sebagai sarana manipulasi makna. Temuan utama penelitian meliputi:

1. Tindak Tutur dalam Komunikasi Politik

Sebanyak 80% responden survei menyatakan bahwa mereka terpengaruh oleh cara politisi menyampaikan pesan, khususnya melalui pernyataan yang bersifat emosional dan persuasif. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak tutur memiliki peran penting dalam membentuk persepsi politik Masyarakat.

2. Implikator dalam Membangun Narasi

Hasil survei menunjukkan bahwa 70% responden percaya politisi sering menggunakan makna tersirat (implikatur) dalam menyampaikan pesan politik. Teknik ini dianggap efektif dalam menggugah emosi sekaligus memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap isu-isu tertentu.

3. Strategi dalam Penyampaian Informasi

Analisis konten menemukan bahwa 65% pidato politik yang dikaji menggunakan framing yang menguntungkan untuk membangun citra positif bagi partai atau kandidat tertentu. Teknik ini memperlihatkan bagaimana narasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan strategis.

4. Peran Media Sosial dalam Memperkuat Pesan Politik

Sebagian besar responden (85%) merasa bahwa media sosial menjadi medium yang sangat berpengaruh dalam menyampaikan dan memperkuat pesan politik. Hal ini semakin menegaskan peran media sosial dalam membangun opini publik.

Dalam komunikasi politik, tindak tutur memainkan peran penting sebagai alat untuk membangun hubungan emosional dengan audiens dan memengaruhi opini mereka. Tindak tutur ilokusi, seperti pernyataan deklaratif, sering digunakan oleh politisi untuk menyampaikan janji dan komitmen yang membangun citra positif. Misalnya, frasa seperti "Kami akan memastikan kesejahteraan untuk semua" tidak hanya menginformasikan, tetapi juga memotivasi audiens untuk percaya pada visi politisi tersebut. Seperti yang dicatat oleh Budiawan (2015), politisi sering menggunakan tindak tutur emosional untuk menghubungkan diri mereka dengan rakyat, memanfaatkan emosi seperti harapan dan kebanggaan untuk memperkuat pesan mereka. Namun, efektivitas tindak tutur ini bergantung pada kredibilitas politisi, karena jika janji yang diberikan tidak ditepati, kepercayaan publik dapat menurun, sehingga memperlemah pengaruh pesan tersebut.

Pola emosional dalam tindak tutur semakin sering digunakan oleh politisi untuk membangkitkan perasaan tertentu dalam masyarakat, seperti kebanggaan, ketakutan, atau solidaritas. Strategi ini efektif karena pesan-pesan yang bersifat emosional lebih mudah diterima dan diingat oleh audiens (Pratiwi, 2009). Sebagai contoh, pernyataan seperti "Kita adalah bangsa besar yang tidak akan menyerah pada tantangan" berfungsi untuk menumbuhkan rasa kebanggaan nasional dan membangkitkan semangat kolektif. Adnan & Mona (2024) mengamati bahwa politisi yang berhasil menggunakan bahasa emosional sering kali memperoleh dukungan lebih besar. Namun, penggunaan emosi juga memiliki risiko, terutama jika politisi terlalu mengandalkan rasa takut atau kemarahan untuk memobilisasi audiens, yang dapat mengarah pada polarisasi dan ketegangan sosial.

Politisi sering memanfaatkan implikatur untuk menyampaikan pesan secara tersirat dan memengaruhi opini publik tanpa secara eksplisit menyatakan posisi mereka. Misalnya, frasa seperti "Kita semua tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas masalah ini" mengimplikasikan pihak tertentu tanpa menyebutkan mereka secara langsung. Nurhayati, M. (2023) menunjukkan bahwa teknik ini memungkinkan politisi untuk menyampaikan kritik atau serangan tanpa konsekuensi langsung. Meskipun implikatur memberi fleksibilitas dalam komunikasi, penggunaannya harus hati-hati agar tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan atau membingungkan audiens. Ketika implikatur digunakan untuk membingkai lawan politik secara negatif tanpa bukti yang jelas, ini dapat merusak kepercayaan publik dan memperburuk polarisasi politik.

Penggunaan implikatur dalam pesan politik sering kali mempengaruhi cara publik memandang isu atau kebijakan tanpa memberikan informasi yang lengkap. Sebagai contoh, ketika politisi mengatakan, "Kita semua tahu bahwa perubahan ini diperlukan untuk masa depan kita," mereka mengarahkan audiens untuk menerima perubahan tersebut sebagai hal yang tidak dapat dibantah, meskipun tidak menjelaskan secara rinci mengapa kebijakan tersebut harus diambil. Hal ini menunjukkan bagaimana implikatur dapat membentuk opini tanpa memberikan pemahaman penuh tentang situasi yang sebenarnya. Seperti yang ditemukan dalam survei penelitian ini, 70% responden mengakui bahwa mereka merasa dipengaruhi

oleh pesan yang disampaikan melalui implikatur. Literasi politik yang lebih baik dapat membantu masyarakat memahami dan mengkritisi pesan-pesan semacam ini.

Framing berfungsi untuk membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu politik dengan menonjolkan aspek tertentu dan mengabaikan aspek lain yang tidak menguntungkan. Wattimena & Latuheru (2021) dan Kisesa et al (2024) mencatat bahwa framing sering digunakan dalam kampanye politik untuk memperkuat citra positif politisi atau partai, misalnya dengan membingkai kebijakan pengangguran sebagai "tantangan bersama" yang membutuhkan partisipasi publik. Framing ini dapat memanipulasi bagaimana audiens memahami masalah tersebut, dan mengarahkan mereka untuk fokus pada solusi yang diajukan tanpa mempertanyakan kebijakan atau tindakan yang diambil. Dalam beberapa kasus, framing dapat juga digunakan untuk mendiskreditkan pihak lawan, menggambarkan mereka sebagai "tidak peduli" atau "tidak kompeten," yang memperburuk polarisasi dan menghambat diskusi yang konstruktif.

Framing juga digunakan untuk mempolitisasi isu-isu sosial dengan cara yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung kebijakan atau tindakan tertentu yang dianggap sesuai dengan kepentingan politik. Misalnya, isu kemiskinan sering dibingkai sebagai "ancaman sosial besar" yang hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan yang sangat mendesak. Framing ini mengarahkan audiens untuk melihat masalah sosial bukan sebagai isu struktural yang kompleks, tetapi sebagai tantangan yang memerlukan solusi cepat dan drastis. Ini memperlihatkan bagaimana framing dapat menyederhanakan isu-isu sosial yang rumit dan memobilisasi dukungan untuk kebijakan yang lebih populis, meskipun mungkin tidak efektif dalam jangka panjang.

Media sosial memiliki peran besar dalam memperkuat pesan politik dengan memungkinkan politisi menjangkau audiens lebih luas dan langsung. Melalui platform seperti Twitter atau Facebook, politisi dapat menyebarkan pesan dengan cepat dan menciptakan narasi yang lebih personal, seperti video langsung atau unggahan yang menggugah emosi (Traubhaar et al (2012). Lebih lanjut, Adnan & Mona (2024) dan Alfiyani (2018) menunjukkan bahwa media sosial mempercepat penyebaran pesan politik, baik yang positif maupun yang manipulatif. Namun, media sosial juga meningkatkan risiko penyebaran disinformasi, karena tidak ada filter yang ketat terhadap klaim-klaim yang tidak terverifikasi. Dalam beberapa kasus, media sosial dapat memperburuk polarisasi, memperkuat perbedaan politik dan mempercepat penyebaran narasi ekstrem.

Polarisasi politik semakin tajam dengan adanya media sosial, yang memperburuk perbedaan pandangan politik dengan memperkuat "echo chambers," di mana audiens hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Hal ini menyebabkan semakin terpisahnya kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang sulit menemukan titik temu dalam diskusi politik. Seperti yang dicatat oleh Adnan & Mona (2024) dan Alfiyani (2018), media sosial mendorong interaksi antar pengguna dengan pandangan yang sangat mirip, sehingga memperburuk polarisasi. Ini mengarah pada peningkatan ketegangan sosial dan penurunan kemampuan untuk berkomunikasi lintas kelompok politik, yang dapat menghambat proses demokrasi yang sehat.

Manipulasi bahasa dalam politik dapat merusak kualitas demokrasi dengan mengurangi transparansi dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik. Ketika politisi menggunakan teknik framing, implikatur, atau tindak

tutur yang manipulatif, mereka menciptakan narasi yang tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Wattimena & Latuheru (2021) dan Kisesa et al (2024) menunjukkan bahwa teknik-teknik ini sering digunakan untuk mempengaruhi opini publik tanpa memberikan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan yang rasional. Ketidakpercayaan yang ditimbulkan oleh manipulasi bahasa ini dapat mengurangi partisipasi politik yang bermakna, mempolarisasi masyarakat, dan merusak akuntabilitas dalam sistem demokrasi.

Literasi politik yang baik sangat penting untuk melawan manipulasi bahasa dalam komunikasi politik. Dengan literasi politik yang tinggi, masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi pesan-pesan politik dan memahami teknik-teknik yang digunakan untuk memanipulasi opini mereka. Literasi ini juga membantu audiens untuk membedakan antara informasi yang sah dan yang menyesatkan, serta mengurangi dampak polarisasi yang diperburuk oleh media sosial. Sebagai solusi, penting untuk meningkatkan kesadaran kritis melalui pendidikan literasi politik yang mengajarkan cara mengenali teknik framing, implikatur, dan manipulasi bahasa lainnya yang sering digunakan dalam komunikasi politik.

4. KESIMPULAN

Dalam komunikasi politik, bahasa memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik, mempengaruhi persepsi terhadap kebijakan, dan menciptakan citra politisi. Dari kajian mendalam terhadap sepuluh poin utama yang mencakup tindak tutur, implikatur, framing, dan peran media sosial, dapat disimpulkan bahwa politisi menggunakan strategi bahasa secara cerdas untuk membangun narasi yang dapat mempengaruhi pemilih dan masyarakat secara luas. Tindak tutur, baik yang bersifat deklaratif maupun emosional, terbukti efektif dalam membangun hubungan antara politisi dan audiens, sementara implikatur memberikan fleksibilitas dalam menyampaikan pesan yang lebih mendalam tanpa mengungkapkan posisi politik secara eksplisit.

Framing menjadi alat utama dalam membentuk persepsi publik terhadap isu politik, dengan menonjolkan aspek tertentu dari masalah atau kebijakan, sementara mengabaikan elemen-elemen yang tidak menguntungkan. Penggunaan framing yang efektif dapat memperkuat pesan politisi, namun dalam beberapa kasus, dapat pula memperburuk polarisasi politik dan mempengaruhi kualitas diskursus publik. Media sosial semakin memperburuk fenomena ini dengan mempercepat penyebaran pesan dan menciptakan ruang informasi terfragmentasi, yang memperburuk polarisasi dan menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi.

Polarisasi yang diperburuk oleh media sosial dan manipulasi bahasa berisiko merusak kualitas demokrasi. Ketidakpercayaan publik terhadap politisi dan institusi politik dapat meningkat ketika strategi bahasa digunakan untuk menutupi fakta atau membingkai isu dengan cara yang tidak jujur. Oleh karena itu, literasi politik yang lebih baik sangat diperlukan untuk membantu masyarakat mengenali dan mengkritisi pesan politik yang diterima, serta memperkuat kualitas demokrasi dengan meningkatkan kesadaran kritis terhadap manipulasi bahasa dalam komunikasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Mona, N. (2024). Strategi Komunikasi Politik melalui Media Sosial oleh Calon Presiden Indonesia 2024. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 1-20. DOI: 10.14710/politika.15.1.2024.1-20

- Alfiyani, N. (2018). Media sosial sebagai strategi komunikasi politik. *Potret Pemikiran*, 22(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>
- Budiawan, R. Y. S. (2015). Kajian Sosio-Pragmatik Daya Pragmatik Tindak Tutur pada Baleho Partai Politik Nasional Demokrat (Nasdem) Yogyakarta. In *PRASASTI: CONFERENCE SERIES* (pp. 406-412).
- Cangara, H. (2011). *Komunikasi politik konsep, teori dan strategi*.
- Dan, N. (1989). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media* (Edisi Terjemahan oleh Tjun Surjaman). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hamka, N. (2022). Language Policy and Planning: Diglossia in Indonesia. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 295–301. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i2.1948>
<https://doi.10.34567/jbs.v8i1.1234>
- Huyler, D., & McGill, C. M. (2019). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, by John Creswell and J. David Creswell. Thousand Oaks, CA: Sage Publication, Inc.. *New Horizons in Adult Education & Human Resource Development*, 31(3).
- Kisesa, F. F., Wuryaningrum, R., & Parto, P. (2024). Tindak Tutur Ilokusi dalam Podcast Politik pada Kanal Youtube Total Politik. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 18(2), 26-38 DOI: <https://doi.org/10.24815/jbs.v18i2.33851>
- Nurhayati, M. (2023). Komunikasi Politik dan Peran Media dalam Pemilihan Umum. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 1(2), 217-222.
- Pratiwi, I. (2009) Hubungan Antara Iklan Partai Politik Di Televisi Dengan Sikap Pemilih Pada Pemilu 2009. Skripsi Thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta.
- Traubhaar, J. D., LaRose, R., & Davenport, L. (2012). *Media now: Understanding media, culture, and technology*. Cengage Learning.
- Wattimena, D., & Latuheru, R., (2021). Analisis Framing: Pemberitaan Kampanye Tiga Pasangan Calon Pilkada Maluku Periode Tahun 2018-2023 pada INews TV Ambon. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 16-25. <https://doi.org/10.51135/kambotivol2issue1page16-25>